KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KANTOR WILAYAH NUSA TENGGARA TIMUR
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
DIVISI ADMINISTRASI

NOMOR SOP	:	W22. PB. 01.03 - 6511
TANGGAL PEMBUATAN	:	3 Desember 2021
TANGGAL REVISI	:	
TANGGAL EFEKTIF	:	3 Januari 2022
DISAHKAN OLEH	:	Kepala Kantor Wilayah **Marciana Dominika Jone** **NIP 196411261991032001**
NAMA SOP	:	**PENGAJUAN REVISI RKBMN KEMENTERIAN DENGAN APLIKASI SIMAN (SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA)**

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
2. PP 28 Tahun 2020 perubahan atas PP No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
3. PMK No. 150/PMK.06/2014 tentang Perencanaan Kebutuhan BMN
4. PMK No. 7/PMK.06/2016 tentang Perubahan atas PMK No 248/PMK.06/2011 tentang Standar Barang Standar Kebutuhan Berupa Tanah dan /atau Bangunan
5. PMK No 172/PMK.06/2020 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara
6. PMK Nomor 76/PMK.06/2015 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan di Dalam Negeri

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Mengetahui peraturan-peraturan terkait Perencanaan Kebutuhan BMN
2. Mengetahui tugas dan fungsi Sistem dan Prosedur Administrasi Pemerintah
3. Dapat Mengoperasikan aplikasi SIMAN

KETERKAITAN:

1. SOP Penyusunan RKBMN Kementerian dengan Aplikasi SIMAN (Sistem Informasi Manajemen Aset)
2. SOP Pengajuan Revisi RKBMN dengan Aplikasi SIMAN Tingkat Satker

PERALATAN / PERLENGKAPAN :

1. Dokumen RKBMN SIMAN
2. Komputer/Printer/Scanner
3. Jaringan Internet

PERINGATAN :

Agar usulan yang diajukan benar-benar merupakan kebutuhan rill dari satker

PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :

Disimpan sebagai data elektronik dan manual

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGAJUAN REVISI RKBMN KEMENTERIAN DENGAN APLIKASI SIMAN (SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA)

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			KET
		KPB	Koordinator Wilayah	Koordinator Eselon I	Koordinator Kementerian	APIP	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Kuasa Pengguna Barang mengidentifikasi kebutuhan satker, kemudian mengajukan usulan revisi Rencana Kebutuhan BMN berupa kendaraan dinas jabatan, tanah/bangunan gedung kantor dan tanah/bangunan Rumah Negara ke Koordinator Wilayah						Dokumen hasil identifikasi kebutuhan BMN satuan kerja	14 hari	Surat pengantar, usulan revisi RKBMN Pengadaan/revisi RKBMN Pemeliharaan, SPTJM dan dokumen pendukung (selanjutnya disebut Dokumen revisi RKBMN SIMAN satker)	- SOP identifikasi kebutuhan BMN satker - SOP pengajuan revisi RKBMN dengan aplikasi SIMAN tingkat satker
2	Menghimpun usulan revisi RKBMN dari satker selanjutnya meneruskan usulan tersebut ke Koordinator Eselon I						Dokumen revisi RKBMN SIMAN satker	7 hari	Dokumen revisi RKBMN SIMAN Koordinator Wilayah	SOP pengajuan revisi RKBMN dengan aplikasi SIMAN Koordinator Wilayah
3	Memeriksa dan meneliti substansi dan kelengkapan usulan revisi RKBMN dari Koordinator Wilayah. Bila setuju akan diteruskan ke Koordinator Kementerian, bila tidak setuju dikembalikan untuk diperbaiki.						Dokumen revisi RKBMN SIMAN Koordinator Wilayah	7 hari	Dokumen revisi RKBMN SIMAN Koordinator Eselon I	SOP pengajuan revisi RKBMN dengan aplikasi SIMAN Koordinator Eselon I
4	Memeriksa dan meneliti substansi dan kelengkapan usulan revisi RKBMN dari Koordinator Eselon I. Bila setuju akan diteruskan ke APIP untuk dilakukan review, bila tidak setuju dikembalikan untuk diperbaiki.						Dokumen revisi RKBMN SIMAN Koordinator Eselon I	7 hari	Dokumen revisi RKBMN SIMAN Kementerian	
5	Melakukan review terhadap usulan revisi RKBMN Kementerian, kemudian menyampaikan kembali ke Koordinator Kementerian untuk ditindaklanjuti						Dokumen revisi RKBMN SIMAN Kementerian	7 hari	Catatan Hasil Review APIP dan dokumen revisi RKBMN SIMAN Kementerian	SOP review usulan revisi RKBMN Kementerian
6	Menindaklanjuti Catatan Hasil review dari APIP, kemudian menyampaikan usulan revisi RKBMN yang telah diperbaiki ke Kementerian Keuangan untuk ditelaah lebih lanjut						Catatan Hasil Review APIP dan dokumen revisi RKBMN SIMAN Kementerian	3 hari	Dokumen revisi RKBMN SIMAN Kementerian pasca review APIP	

